

Analisis Framing Pemberitaan Efisiensi Anggaran Pendidikan 2025 Melalui Pemberitaan Media Kompas.com dan Detik.com

¹Awalul Uzwatun Khasanah, ²Muchamad Rizqi, ³Fransisca Benedicta Avira Citra Paramita

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Awalulawal6@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembingkaian (framing) pemberitaan mengenai pemangkasan anggaran pendidikan tahun 2025 oleh dua media online nasional, Kompas.com dan Detik.com. Pemangkasan anggaran tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan berdampak pada sektor pendidikan, termasuk pemotongan dana KIP Kuliah, BOPTN, dan program strategis lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis framing model Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media memiliki pendekatan pembingkaian yang berbeda dalam mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, menilai secara moral, serta menawarkan solusi terhadap isu yang diangkat. Kompas.com tampil sebagai media yang mengkritisi kebijakan secara tajam dan pembelaan terhadap keadilan struktural, dengan menekankan dampak struktural dan ketimpangan kebijakan efisiensi yang dinilai merugikan sektor pendidikan, terutama kelompok rentan seperti mahasiswa penerima beasiswa, dosen non-PNS, dan wilayah 3T. sementara Detik.com tampil sebagai media yang lebih fokus pada penyampaian informasi resmi dan menjaga citra kebijakan pemerintah, seperti penjelasan teknis dan alasan di balik kebijakan efisiensi anggaran.

Kata kunci: framing,berita,media baru,framing model Robert N. Entman,Kebijakan

Abstract

This study aims to analyze the framing of news coverage regarding the 2025 education budget cuts by two national online media platforms, Kompas.com and Detik.com. The budget cuts are outlined in Presidential Instruction (Inpres) No. 1 of 2025 and have had a significant impact on the education sector, including reductions in KIP Kuliah scholarships, BOPTN, and other strategic programs. This research uses a descriptive qualitative method with a framing analysis approach based on Robert N. Entman's model. The findings indicate that the two media outlets employ different framing approaches in defining problems, diagnosing causes, making moral judgments, and offering solutions to the issues presented. Kompas.com positions itself as a media outlet that strongly criticizes the policy and advocates for structural justice, highlighting the structural impacts and inequalities of the efficiency policy, which are seen to disadvantage the education sector—particularly vulnerable groups such as scholarship recipients, non-permanent lecturers, and underdeveloped regions (3T). In contrast, Detik.com appears more focused on delivering official information and maintaining the government's policy image, emphasizing technical explanations and the rationale behind the budget efficiency policy.

Keyword: framing,news,new media,framing model Robert N. Entman,Policy

Pendahuluan

Penelitian ini mengkaji bagaimana Kompas.com dan Detik.com membungkai pemberitaan tentang pemangkasan anggaran pendidikan 2025. Pemangkasan anggaran ini dimulai dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025, dengan target efisiensi belanja negara sebesar Rp 306,69 triliun, termasuk pemotongan anggaran di sektor pendidikan, yakni Rp 8,03 triliun untuk Kemendikdasmen dan Rp 22,54 triliun untuk Kemendikti Saintek. Kebijakan ini berdampak pada program penting seperti beasiswa KIP Kuliah dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Namun, pemangkasan ini dianggap bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengharuskan alokasi minimal 20 persen APBN untuk pendidikan (Juanda, 2021).

Kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan akademisi, seperti Mochammad Thanthowy Syamsuddin dari Universitas Airlangga yang menilai alokasi anggaran pendidikan 2025 turun menjadi Rp 607,4 triliun atau 16,77 persen dari total belanja negara, jauh di bawah ketentuan konstitusi (Tempo, 2025). Bahana (2025) juga memperingatkan pemangkasan ini dapat menghambat program strategis, terutama di pendidikan tinggi, termasuk keberlanjutan beasiswa KIP-K. Selain itu, kebijakan ini memicu protes dari mahasiswa dan aktivis yang menggelar demonstrasi “Indonesia Gelap” di berbagai kota, dengan tagar yang trending di media sosial sejak Februari 2025 (@bemsi.official). Media massa seperti Kompas.com dan Detik.com memberikan liputan luas tentang kebijakan ini dan reaksi publik, sehingga peran media dalam membentuk opini sangat penting.

Penelitian ini menggunakan analisis framing dari Robert N. Entman yang meliputi mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, membuat penilaian moral, dan memberikan solusi, untuk memahami bagaimana kedua media tersebut menyajikan isu pemangkasan anggaran pendidikan 2025. Kompas.com biasanya menghadirkan analisis mendalam dan kontekstual, sedangkan Detik.com lebih aktif melaporkan berbagai aspek dan reaksi terkait kebijakan ini. Studi sebelumnya oleh Wegga Miftakhul dan Juliani Nur Maghfirah Aesthetik (2018) juga menunjukkan bagaimana media membungkai isu dengan model framing yang

berbeda, menjadi referensi penting bagi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kompas.com dan Detik.com membingkai pemberitaan efisiensi anggaran pendidikan 2025 agar dapat memahami pengaruh framing media terhadap persepsi publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data utama diperoleh dari pemberitaan Kompas.com dan Detik.com mengenai pemangkasan anggaran pendidikan 2025 yang diterbitkan pada periode Januari hingga Maret 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan observasi terhadap isi berita, dengan teknik purposive sampling. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni penelitian deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini diambil karena peneliti ingin mendeskripsikan cara media membingkai isu secara mendalam. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis bagaimana media membingkai isu efisiensi anggaran pendidikan 2025. Subjek dalam penelitian ini yakni media Kompas.com dan Detik.Com. sedangkan objek dari penelitian ini adalah bingkai pemberitaan pemangkasan anggaran pendidikan 2025 dalam media online [kompas.com](#) dan [detik.com](#).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi dan observasi. Data dokumentasi penelitian diperoleh dari berbagai sumber dokumen, seperti berita, artikel, dan jurnal ilmiah. Dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan kemudian diamati dan ditelaah untuk mendukung pelaksanaan penelitian dilakukan melalui observasi atau pengamatan terhadap data yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari laman media Kompas.com Dan Detik.Com, berupa berita tentang pemangkasan anggaran dana pendidikan 2025, yang dipublikasikan selama periode januari hingga maret 2025. Data sekunder didapatkan dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah (APBN 2025 dan Inpres No. 1 Tahun 2025), serta penelitian terdahulu yang relevan dengan framing media dan kebijakan pendidikan.

Penelitian ini menerapkan metode model analisis framing Robert N. Entman untuk menganalisis cara [kompas.com](#) dan [detik.com](#) menyajikan pemberitaan terkait pemangkasan anggaran dana pendidikan 2025. Dengan menggunakan empat elemen analisis framing, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana media membingkai kebijakan pangkasan anggaran pendidikan 2025 yang di lakukan oleh pemerintah. Proses penelitian diawali dengan mengumpulkan berita-berita yang relevan melalui teknik purposive sampling, kemudian dilakukan pengkodean dan analisis teks berita berdasarkan elemen-elemen framing tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Kompas.com dan [Detik.com](#) sebagai media nasional yang juga berbasis online sekarang banyak menyajikan serangkaian berita baik dari dalam negeri dan dari luar negeri. Berbagai isu tak luput dari liputannya termasuk isu pemangkasan anggaran pendidikan 2025 yang jadi objek peneliti kali ini. Peneliti mengambil 3 berita pada periode terbit februari-juni 2025 yang telah merepresentasi seluruh berita. Dengan menggunakan 3 tema pemberitaan pemangkasan anggaran pendidikan 2025 sebagai objek penelitian yaitu kebijakan publik, kapitalisme dan komunikasi politik. serta media [kompas.com](#) dan [detik.com](#) sebagai subjek penelitian, didapat hasil analisis melalui analisis framing Robert N. Entman pada penelitian “Analisis Framing Pemberitaan efisiensi anggaran pendidikan 2025 melalui pemberitaan media [kompas.com](#) dan [detik.com](#)” sebagai berikut.

a. Kebijakan publik

Dalam elemen *Define Problems* Kompas.com melihat isu pemangkasan anggaran pendidikan dari sudut pandang yang lebih luas, yaitu dalam konteks kebijakan publik secara keseluruhan. Fokus utama Kompas adalah pada pemangkasan anggaran pendidikan sebesar Rp 22 triliun yang berdampak signifikan terhadap semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sementara Detik menyoroti bahwa pemotongan anggaran menyebabkan penurunan drastis jumlah peserta PPG, dari 806.640 menjadi 401.600, yang dapat menghambat proses sertifikasi guru dan kesejahteraan mereka. Dalam hal ini, Detik mengutip pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, yang menyebut: “*Hampir separuhnya, tetapi dapat dibiayai tahun 2025...*” sebagai bentuk penegasan bahwa pemotongan ini berisiko terhadap kualitas pendidikan tenaga pengajar.

Masuk ke dalam elemen *Diagnose Causes* Kompas menyoroti adanya ketimpangan dalam pelaksanaan efisiensi tersebut, seperti yang terlihat dalam kutipan: “*gaji dan tunjangan pegawai bebas dari pemangkasan anggaran,*” yang menimbulkan kesan bahwa pemangkasan dilakukan secara tidak adil dan lebih membebani sektor pendidikan. Detik.com melihat penyebab pemangkasan dari sisi yang lebih teknis dan administratif. Pemotongan kuota PPG dijelaskan sebagai konsekuensi dari keterbatasan anggaran negara, ditambah dengan beban jangka panjang berupa tunjangan profesi guru yang harus ditanggung pemerintah. Hal ini ditegaskan melalui kutipan dari Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, yang menyatakan: “*Kalau memenuhi seluruhnya 800 ribu (guru) memang cukup berat...*” Dalam elemen *Make Moral Judgment* Kompas.com secara tegas menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemangkasan ini, karena dinilai tidak berpihak pada kelompok rentan dalam pendidikan. Media ini memperkuat argumen moralnya dengan data, seperti: “*Beasiswa program KIP kuliah: pagu awal Rp14,6 triliun, terkena efisiensi 9 persen atau Rp1,3 triliun,*” dan “*Program Sekolah Unggul Garuda: pagu awal Rp2 triliun, diefisiensi 60 persen atau Rp1,2 triliun.*” Terakhir, pada elemen *Treatment Recommendation* Kompas.com tidak secara eksplisit memberikan solusiSementara itu, Detik.commenyoroti bahwa pemerintah masih berupaya mempertahankan tunjangan guru non-ASN di wilayah

3T, bahkan menaikkan nominalnya dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta, dengan total anggaran sebesar Rp 11,5 triliun. Namun, Detik juga menunjukkan bahwa kebijakan ini belum menyentuh kelompok guru yang belum tersertifikasi dan justru masih sangat membutuhkan pelatihan PPG.

b. Kapitalisme Kebijakan Pemangkasan Anggaran Pendidikan 2025

Dalam elemen *Define Problems* Kompas.com secara tegas mendefinisikan kebijakan efisiensi pasca Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sebagai krisis pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan. Dengan menggunakan frasa seperti “menyayat hati masyarakat,” Kompas membangun narasi emosional dan menggugah simpati publik terhadap kelompok rentan yang paling terdampak, seperti penerima beasiswa dan institusi pendidikan tinggi. Kebijakan efisiensi diposisikan sebagai bentuk kelalaian negara dalam menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya. Sedangkan Detik.com menggambarkan kebijakan efisiensi sebagai cerminan logika kapitalisme negara. Pemangkasan anggaran dilihat sebagai upaya pengelolaan fiskal dan utang negara, namun berdampak serius terhadap lembaga-lembaga publik, termasuk lembaga pendidikan dan penelitian. Dengan menyisipkan narasi konkret seperti “pemotongan anggaran sebesar Rp 109,8 miliar membuat lembaga ini hanya mampu membayar gaji pegawai hingga Agustus 2025,” Perbedaan pembingkaian juga terlihat dalam elemen *Diagnose Causes* Kompas.com secara langsung menunjuk kebijakan efisiensi fiskal pemerintah sebagai penyebab utama dan menilai bahwa kebijakan ini dijalankan secara tidak proporsional, dengan sektor pendidikan menjadi korban utama. Frasa seperti “ada banyak layanan publik di sektor pendidikan yang akhirnya menjadi korban” digunakan untuk menekankan bahwa kebijakan negara tidak adil dan bias terhadap sektor yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Sebaliknya, Detik mengaitkan kebijakan efisiensi ini dengan tekanan fiskal akibat utang negara yang besar serta tuntutan janji-janji populis, seperti program makanan bergizi gratis, yang menyita ruang fiskal dan memaksa penghematan di sektor lain. Dengan menyisipkan narasi seperti “efisiensi anggaran menjadi keharusan untuk mendukung janji politik Prabowo,” Detik menyoroti bahwa kebijakan ini lebih merupakan respons terhadap tekanan politik dan fiskal, bukan keputusan yang dilandasi analisis kebutuhan sektoral. Dalam elemen *Make Moral Judgment* Kompas.com menyebut kebijakan efisiensi ini sebagai bentuk ketidakadilan yang bertengangan dengan amanat konstitusi seperti dalam pernyataan “sudahkah memberikan hati yang paling dalam sebelum mengorbankan anggaran pendidikan demi efisiensi?” serta penegasan bahwa “pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara.” Kompas dengan tegas menempatkan pemerintah sebagai pihak yang telah gagal secara etis dalam melindungi masa depan bangsa. Sebaliknya, Detik.com menyoroti bahwa efisiensi tanpa keberpihakan pada rakyat dapat menimbulkan krisis legitimasi politik dan sosial. Narasi seperti “tanpa keberpihakan pada rakyat, efisiensi dapat mengarah pada krisis legitimasi” menunjukkan bahwa Detik lebih menekankan persoalan pada ketimpangan relasi kekuasaan, di mana rakyat diposisikan sebagai objek dari kebijakan ekonomi negara.

Dalam elemen *define problems*. Kompas.com tidak menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran sebagai inti masalah, melainkan memfokuskan pada respons pemerintah terhadap kekhawatiran publik yang muncul akibat misinformasi, terutama di media sosial. Dalam berita berjudul “Efisiensi Anggaran, Sri Mulyani Pastikan Anggaran Beasiswa Tak Kena Pangkas”, Kompas menekankan bahwa keresahan masyarakat, terutama mahasiswa, dipicu oleh informasi yang simpang siur mengenai pemangkasan beasiswa. Sebaliknya, Detik.com lebih kritis dan tajam dalam membincangi persoalan, yakni sebagai bentuk manipulasi naratif oleh pemerintah. Dengan menyoroti penggunaan istilah seperti “penyesuaian” dan “efisiensi” sebagai pengganti kata “pemangkasan”, Detik menunjukkan adanya upaya dari pemerintah untuk mendefinisikan ulang kebijakan agar terdengar lebih netral dan dapat diterima. Perbedaan pendekatan ini juga terlihat dalam elemen *diagnose causes*, di mana Kompas.com menempatkan penyebab utama keresahan publik bukan pada kebijakan efisiensi itu sendiri, tetapi pada penyebaran disinformasi di media sosial, seperti akun @sbmptnfess yang menyampaikan bahwa mahasiswa berpotensi putus kuliah akibat beasiswa dipotong. Dalam bingkai ini, pemerintah diposisikan sebagai pihak yang responsif dan bertanggung jawab, berusaha memulihkan ketenangan dengan klarifikasi bahwa anggaran beasiswa tidak mengalami pemotongan. Sementara itu, Detik.com membawa pembacanya untuk melihat penyebab dari tingkat struktural, dengan menyebut bahwa ketidakpastian anggaran pendidikan berakar pada keputusan politik berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Frasa seperti “telah dihitung secara matang” menjadi penanda bahwa meski program utama tetap berjalan, kebijakan efisiensi tetap memiliki konsekuensi terhadap kualitas dan keberlanjutan pelayanan publik. Dengan kata lain, Kompas memandang kekacauan sebagai akibat dari krisis komunikasi, sementara Detik memandangnya sebagai konsekuensi kebijakan politik yang kompleks dan penuh pertimbangan fiskal. Dalam *make moral judgment* Kompas.com secara tegas membincangi pemerintah sebagai pelindung hak dasar warga negara, khususnya hak atas pendidikan. Framing ini menampilkan pemerintah bukan hanya sebagai pembuat kebijakan rasional, tetapi juga sebagai entitas bermoral yang menjunjung tinggi kesejahteraan sosial di tengah tekanan fiskal. Sementara itu, Framing moral dalam Detik terlihat dari penekanan bahwa kementerian pendidikan tetap memprioritaskan program-program penting yang menyentuh kehidupan rakyat banyak, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), dana BOS, dan sertifikasi guru. Pernyataan seperti “program menyangkut hajat hidup orang banyak tetap bertahan” mengandung nilai moral bahwa pemerintah bertanggung jawab dan berpihak pada rakyat kecil, meskipun berada dalam situasi fiskal yang menantang. Namun, jika dibandingkan dengan Kompas, framing moral di Detik terasa lebih berhati-hati dan fokus pada efisiensi sebagai strategi yang tetap berkeadilan.

Secara keseluruhan, Kompas.com dan Detik.com memiliki cara yang berbeda dalam memberitakan pemangkasan anggaran pendidikan tahun 2025, sehingga memunculkan sudut pandang yang berbeda bagi pembaca. Kompas.com melihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih luas, menyoroti bagaimana kebijakan

pemangkasan ini berdampak besar pada sistem pendidikan nasional, terutama bagi kelompok rentan seperti mahasiswa penerima beasiswa dan dosen non-PNS. Kompas juga menilai bahwa kebijakan ini tidak adil dan menunjukkan bahwa pemerintah kurang memprioritaskan pendidikan. Narasi yang dibangun terasa emosional dan tegas, seolah ingin menggugah kesadaran publik bahwa masa depan pendidikan sedang terancam. Di sisi lain, Detik.com lebih fokus pada dampak langsung yang terjadi, khususnya pada program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Mereka menjelaskan bahwa pemangkasan dilakukan karena anggaran negara terbatas, bukan karena niat untuk mengabaikan pendidikan. Detik.com terlihat lebih mencoba memahami posisi pemerintah, meskipun tetap menyoroti bahwa pemangkasan ini membawa masalah, terutama bagi guru yang sedang menjalani proses sertifikasi. Jika Kompas.com terlihat lebih kritis dan emosional, maka Detik.com cenderung netral dan realistik.

Penutup

Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Kompas.com dan Detik.com memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memberitakan pemangkasan anggaran pendidikan tahun 2025. Kompas.com lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah, menyoroti ketidakadilan dalam pemotongan anggaran yang dianggap merugikan sektor pendidikan dan kelompok rentan. Mereka membingkai isu ini sebagai masalah besar yang bisa menghambat masa depan pendidikan nasional. Sementara itu, Detik.com lebih fokus pada dampak praktis dan mencoba memahami alasan di balik kebijakan tersebut, seperti keterbatasan anggaran negara. Meskipun tetap menyuarakan keadilan, Detik menyampaikan informasi dengan gaya yang lebih tenang dan membumi, serta menampilkan upaya pemerintah untuk menjaga program penting tetap berjalan. Dari sini bisa dilihat bahwa Kompas lebih kritis dan idealis dalam membela sektor pendidikan, sedangkan Detik lebih realistik dan berusaha memahami situasi dari sudut pandang kebijakan anggaran. Kedua media ini sama-sama menyampaikan kritik, tapi dengan cara dan penekanan yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Anwar et al., 2018 Anwar, K., Megantari, K., & Lestarini, N. (2018). Analisis Framing Model Robert N. Entman Tentang Berita Kasus Pria Dibakar Hidup-Hidup Di Bekasi Pada Liputan6.Com Edisi 4 Agustus 2017. *Indonesian Journal of Government and Communication Studies*, 2. amar, s. 2025. anggaran pendidikan kena imbas efisiensi, apa saja rinciannya. Diambil kembali dari kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/13/170000765/anggaran-pendidikan-kena-imbas-efisiensi-apa-saja-rinciannya>
- aminudin, m. (2025, februari). Mendikdasmen Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Berdampak Program Prioritas:. Retrieved from detik.com: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7776670/mendikdasmen-tegaskan-efisiensi-anggaran-tak-berdampak-program-prioritas>
- Dewi, D. S. K. 2019. Buku Ajar Kebijakan Publik. UM Jakarta Press, 268.
- Fahmi. 2016. *Analisis Framing Pemberitaan Media Online Rakyat Merdeka Dan Cnn Indonesia Dalam Isu Penetapan 19 Pondok Pesantren Penyebar Paham Radikalisme Oleh Bnpt*. 4(June), 2016.
- Henri. 2019. Kerangka Pemikiran. *Angewandte Chemie*, 17–32. (Ningsih & Haryanti, 2021)
- Juliani, W. M., & Aesthetika, N. M. (2019). Analisis Framing Personal Branding Agus Harimurti Yudhoyono pada Detik.Com. KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi, 6(2), 137. <https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.1936>
- Rahayu, Djumena. (2025, februari). Efisiensi Anggaran, Sri Mulyani Pastikan Anggaran Beasiswa Tak Kena Pangkas. Retrieved from kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2025/02/14/140946826/efisiensi-anggaran-sri-mulyani-pastikan-anggaran-beasiswa-tak-kena-pangkas>
- Supriadi, H. 2016. Peranan Pendidikan Dalam Pengembangan Diri Terhadap Tantangan Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, 3(2), 1–28.
- Saeni, E. (2024). Robert N . Entman ' s Framing Analysis on Academic Community Reporting Criticizing President Jokowi ' s Attitude in the 2024 Election in Online Media (kompas . com , detik . com , and republika . co . id) Analisis Framing Robert N . Entman pada Pemberitaan Sivitas Akademika Mengritik Sikap Presiden Jokowi pada Pemilu 2024 di Media Online (kompas . com , detik . com , dan republika . co . id). 2(1), 31–45.
- (Sulaeman & Islami, 2022)Sulaeman, A. R., & Islami, A. (2022). Pemberitaan Palestina dalam Analisis Framing Robert N Entman. ITTISHAL Jurnal Komunikasi Dan Media.
- safitri, d. (2025, februari). Kuota PPG 2025 Terpotong hingga 50 Persen Imbas Efisiensi Anggaran, Cek Jumlahnya. Retrieved from detik.com: <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7778114/kuota-ppg-2025-terpotong-hingga-50-persen-imbas-efisiensi-anggaran-cek-jumlahnya>
- (Wegga Miftakhul Juliani, 2018). Analisis Framing Personal Branding Agus Harimurti Yudhoyono pada (yaputra, h. 2025). tempo. Retrieved from tempo.com: <https://www.tempo.co/politik/dosen-unair-sebut-pemangkasan-anggaran-ingkari-amanat-20-persen-apbn-untuk-pendidikan-1208942>
- Zaluchu. (2025, februari). Efisiensi Anggaran Jangan Korbankan Masyarakat:. Retrieved from detik.com: <https://news.detik.com/kolom/d-7787438/efisiensi-anggaran-jangan-korbankan-masyarakat>